



## TINDAK KESANTUNAN MODERATIF DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM: KAJIAN PRAGMATIK WACANA POLITIK

Nadia Putri Prastikha<sup>1)</sup>, Harun Joko Prayitno<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: a310220058@student.ums.ac.id<sup>1)</sup>, harun.prayitno@ums.ac.id<sup>2)</sup>

### *Abstract*

*This study examines moderate politeness practices in the comments section of the Instagram account pinterpolitik as part of digital political discourse. This study uses a descriptive qualitative approach with a pragmatic discourse analysis method, based on Leech's politeness principle theory. The data consists of 18 netizen comments collected from political posts on the account pinterpolitik between October 2025 and January 2026. The analysis focuses on three dominant politeness maxims: the maxim of tact, the maxim of agreement, and the maxim of praise. The results show that netizens tend to apply moderate politeness strategies through implicit criticism, argumentative agreement, and affective and rational praise. These strategies serve to minimize potential conflict, maintain face among interlocutors, and build social legitimacy for political figures and policies. These findings confirm that moderate politeness plays a role as an adaptive mechanism in digital political discourse, enabling the expression of critical attitudes without being confrontational, while contributing to the creation of a more ethical and dialogical digital public space.*

**Keywords:** moderate politeness, pragmatics, political discourse, Instagram, comment section

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tindak kesantunan moderatif dalam kolom komentar akun Instagram pinterpolitik sebagai bagian dari wacana politik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana pragmatik, berlandaskan teori prinsip kesantunan Leech. Data berupa 18 komentar warganet yang dikumpulkan dari unggahan politik akun pinterpolitik pada periode Oktober 2025–Januari 2026. Analisis difokuskan pada tiga maksim kesantunan yang dominan, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim persetujuan, dan maksim pujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warganet cenderung menerapkan strategi kesantunan moderatif melalui kritik implisit, persetujuan argumentatif, serta pujian afektif dan rasional. Strategi tersebut berfungsi untuk meminimalkan potensi konflik, menjaga muka mitra tutur, serta membangun legitimasi sosial terhadap figur maupun kebijakan politik. Temuan ini menegaskan bahwa kesantunan moderatif berperan sebagai mekanisme adaptif dalam wacana politik digital yang memungkinkan penyampaian sikap kritis tanpa bersifat konfrontatif, sekaligus berkontribusi pada terciptanya ruang publik digital yang lebih etis dan dialogis.

**Kata Kunci:** kesantunan moderatif, pragmatik, wacana politik, Instagram, kolom komentar

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi masyarakat kontemporer. Instagram yang pada awalnya berfungsi sebagai media berbagi visual kini bertransformasi menjadi ruang interaksi sosial yang menampung beragam praktik komunikasi, termasuk perbincangan politik. Kolom komentar Instagram berperan sebagai ruang publik digital yang memungkinkan warganet menyampaikan pandangan, kritik, serta dukungan terhadap berbagai isu politik yang tengah berkembang. Hasibuan dan Wahyuni (2020) mengungkapkan bahwa respons warganet terhadap konten



politik di media sosial merepresentasikan keragaman sikap dan orientasi politik masyarakat digital. Sejalan dengan itu, Maulidiyah (2022) menyatakan bahwa Instagram telah berkembang menjadi sarana partisipasi politik daring yang merefleksikan keterlibatan publik dalam isu-isu kenegaraan. Oktaviani dan Hermagustiana (2022) turut menegaskan bahwa media sosial mendorong pergeseran pola komunikasi politik ke arah yang lebih terbuka dan partisipatif. Sementara itu, Amelia dan Anwar (2021) menekankan bahwa kolom komentar berfungsi sebagai arena pertarungan wacana yang mencerminkan dinamika demokrasi di ruang digital.

Dalam konteks tersebut, ruang virtual menghadirkan dinamika wacana yang kerap bersifat konfrontatif, namun sekaligus menampilkan praktik kesantunan linguistik sebagai mekanisme untuk mempertahankan relasi sosial dalam komunikasi daring. Putri dan Santosa (2021) mengemukakan bahwa penerapan kesantunan dalam komentar daring merefleksikan upaya warganet menjaga keharmonisan interaksi meskipun terdapat perbedaan pandangan. Sejalan dengan itu, Arifin dan Rahmawati (2021) menemukan bahwa realisasi kesantunan dalam komentar politik mencerminkan etika berkomunikasi masyarakat di ruang digital. Nurhayati dan Yusuf (2023) menegaskan bahwa kesantunan linguistik berfungsi sebagai strategi pragmatik yang efektif dalam mereduksi potensi konflik pada interaksi daring. Sementara itu, Lestari dan Diani (2023) menunjukkan bahwa pemilihan diksi yang santun dalam komentar politik turut berkontribusi dalam menciptakan iklim diskusi yang konstruktif dan sehat di media sosial.

Kesantunan berbahasa merupakan unsur penting dalam interaksi digital, khususnya ketika komunikasi berlangsung secara anonim atau menggunakan identitas samaran. Dalam perspektif pragmatik, kesantunan dipandang sebagai seperangkat strategi linguistik yang dimanfaatkan penutur untuk menjaga citra diri sekaligus mengurangi potensi ancaman terhadap muka mitra tutur. Brown dan Levinson (1987) memperkenalkan konsep *face-threatening acts* beserta strategi kesantunan sebagai bagian dari mekanisme interaksi sosial. Yule (2014) menekankan bahwa kesantunan berperan sebagai komponen fundamental dalam praktik bertutur guna memelihara hubungan sosial. Selanjutnya, Leech (2014) merumuskan prinsip kesantunan secara lebih sistematis melalui maksim-maksim pragmatik. Sementara itu, Watts (2003) memandang kesantunan sebagai praktik sosial yang bersifat kontekstual serta terus dinegosiasikan dalam proses interaksi.

Dalam ranah komunikasi digital, penerapan strategi kesantunan tidak semata-mata tercermin dari pilihan leksikal, tetapi juga tampak melalui penggunaan mitigasi, modalitas, *hedging*, serta bentuk negasi tidak langsung. Farahdiba (2021) mengungkapkan bahwa pemanfaatan modalitas dalam komentar daring berfungsi sebagai sarana penyampaian kritik secara tidak langsung. Sejalan dengan temuan (Wulandari et al. 2023) mengidentifikasi *hedging* sebagai strategi pelembutan tuturan yang lazim digunakan dalam diskusi politik di media sosial. Utami (2020) menegaskan bahwa mitigasi memiliki peran penting dalam menekan potensi konflik pada interaksi daring. Sementara itu, Cahyani (2023) menunjukkan bahwa penggunaan negasi tidak langsung menjadi strategi linguistik untuk mempertahankan citra diri penutur ketika menyatakan ketidaksetujuan terhadap isu-isu politik.

Konteks politik kerap mempersulit penerapan kesantunan berbahasa karena melibatkan perbedaan ideologi, relasi kekuasaan, serta sikap kritis publik terhadap elite politik. Dalam situasi demikian, kesantunan moderatif muncul sebagai bentuk kompromi antara penyampaian kritik dan kehati-hatian berbahasa. Konsep ini merujuk pada praktik kesantunan yang adaptif terhadap situasi komunikasi yang berpotensi memicu konflik, khususnya dalam wacana publik dan politik. Setiawan dan Indriani (2022) menjelaskan bahwa kesantunan moderatif memungkinkan penutur mengemukakan kritik tanpa menggunakan ekspresi yang agresif. Sejalan dengan itu, Cahyani (2023) menegaskan bahwa bentuk kesantunan ini relevan dalam



diskursus digital karena bersifat fleksibel dan sensitif terhadap konteks. Pratama dan Fauzia (2020) menyoroiti bahwa penerapan kesantunan moderatif dapat melindungi penutur dari kemungkinan serangan balik secara verbal. Sementara itu, Fitriani dan Hartono (2022) menunjukkan bahwa strategi tersebut turut berkontribusi dalam menjaga dan membangun relasi interpersonal di tengah perbedaan pandangan politik.

Strategi kesantunan moderatif kerap dimanfaatkan dalam komentar politik di media sosial sebagai sarana untuk menjaga citra positif penutur sekaligus menegaskan posisi ideologisnya. Purwanto dan Ariyani (2020) mengidentifikasi penggunaan ungkapan seperti “ *mungkin sebaiknya* ” sebagai bentuk mitigasi yang bertujuan menghindari konfrontasi secara langsung. Sejalan dengan temuan tersebut, Yuliana et al. (2022) menyatakan bahwa ekspresi “ *saya rasa* ” berfungsi sebagai penanda kehati-hatian ketika menyampaikan kritik. Sari dan Hapsari (2023) menekankan bahwa pemanfaatan pernyataan bersyarat dapat menurunkan intensitas konflik dalam interaksi daring. Sementara itu, Rahayu dan Pranata (2023) menyimpulkan bahwa ungkapan seperti “ *tidak bermaksud menyinggung* ” mencerminkan upaya penutur untuk tetap menjaga hubungan sosial meskipun mengemukakan ketidaksetujuan.

Konteks media sosial seperti Instagram menuntut penerapan strategi komunikasi yang tidak hanya bersifat cepat dan tanggap, tetapi juga mempertimbangkan etika dalam interaksi sosial. Zhao et al. (2018) menyoroiti bahwa pesatnya peredaran informasi di media sosial meningkatkan kebutuhan akan penggunaan bahasa yang beretika. Herring (2007) menjelaskan bahwa karakter media sosial yang bersifat asinkron dan dapat diakses oleh banyak pihak secara simultan memengaruhi cara ujaran digital dipahami dan ditafsirkan. Sementara itu, Tsur dan Rappoport (2012) mengamati bahwa komentar daring berpotensi menyebar secara luas dan memunculkan beragam interpretasi. Zappavigna (2015) menegaskan bahwa pembentukan dan representasi identitas sosial di media sosial sangat ditentukan oleh pilihan bahasa yang digunakan dalam komentar publik.

Dalam komentar politik di media sosial, pengguna cenderung mengekspresikan pendapat secara tegas, namun pada saat yang sama berupaya menghindari risiko serangan balik maupun pelabelan sosial negatif. Dalam konteks ini, kesantunan moderatif berfungsi sebagai strategi komunikasi yang penting karena memungkinkan kritik disampaikan tanpa bersifat ofensif secara langsung. Amalia (2021) mengungkapkan bahwa kritik yang disampaikan secara implisit di media sosial cenderung lebih dapat diterima dibandingkan kritik yang bersifat frontal. Sejalan dengan itu, Kartikasari dan Santoso (2021) menunjukkan bahwa penerapan kesantunan moderatif merefleksikan upaya penutur dalam membangun dan mempertahankan citra diri yang positif. Rukmini dan Suganda (2019) mencatat bahwa bentuk kesantunan ini memberikan ruang bagi warganet untuk menyuarakan aspirasi secara aman tanpa menyinggung pihak lain secara langsung. Sementara itu, Ilhami dan Siregar (2021) menegaskan bahwa kesantunan moderatif merupakan bentuk adaptasi penutur terhadap norma-norma sosial yang berkembang dalam ekosistem komunikasi digital.

Walaupun berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas fenomena ujaran kebencian, praktik trolling, serta kekasaran verbal dalam kolom komentar media sosial, kajian yang secara khusus menyoroiti strategi kesantunan masih relatif terbatas, terutama kesantunan yang bersifat moderatif dalam wacana politik. Alfitri dan Rahmawati (2021) mengungkapkan bahwa fokus penelitian media sosial cenderung didominasi oleh analisis ujaran bernuansa negatif. Senada dengan temuan tersebut, Saputra dan Zulfa (2020) menyatakan bahwa kekasaran verbal dalam komentar politik lebih sering menjadi objek kajian dibandingkan bentuk-bentuk kesantunan berbahasa. Wahyuni dan Nurlaili (2023) menegaskan bahwa praktik resistensi linguistik yang disampaikan secara santun masih membuka peluang besar untuk



diteliti lebih lanjut. Sementara itu, Wijayanti dan Anggraini (2020) menekankan urgensi eksplorasi terhadap strategi komunikasi politik daring yang tidak bersifat konfrontatif sebagai upaya memahami dinamika interaksi digital secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kesantunan moderatif dalam kolom komentar akun Instagram @pinterpolitik, mengklasifikasikan realisasi maksim kesantunan Leech yang dominan digunakan oleh warganet; dan menjelaskan fungsi pragmatik tindak kesantunan moderatif dalam merespons isu-isu politik di ruang digital. Analisis difokuskan pada tiga kategori maksim kesantunan, yaitu (a) maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), (b) maksim persetujuan (*agreemen maxim*), dan (c) maksim pujian (*praise maxim*). Penelitian ini berupaya mengidentifikasi keberadaan serta bentuk-bentuk tindak kesantunan moderatif yang digunakan warganet dalam merespons konten politik. Fokus kajian diarahkan pada strategi linguistik yang dimanfaatkan, konteks kemunculannya, serta fungsi sosial yang menyertainya dalam interaksi digital. Melalui pendekatan pragmatik-kritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian linguistik pragmatik sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi digital yang beretika.

Kajian ini memiliki signifikansi akademik sekaligus relevansi sosial dalam upaya membangun ruang publik digital yang sehat, inklusif, dan beretika. Nasrullah (2015) menegaskan bahwa media sosial berperan strategis sebagai medium pembentukan dan sirkulasi opini publik. Sejalan dengan itu, Nugroho dan Santoso (2022) menekankan pentingnya penguatan pendidikan kewargaan digital guna membentuk masyarakat yang kritis sekaligus santun dalam berinteraksi di ruang daring. Hidayati (2023) menggarisbawahi bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap etika komunikasi agar partisipasi publik tetap selaras dengan norma sosial yang berlaku. Rizky dan Rohmah (2022) menyimpulkan bahwa penerapan strategi kebahasaan yang etis berkontribusi dalam menciptakan iklim diskusi yang konstruktif dan berkelanjutan dalam praktik demokrasi digital.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana pragmatik, berfokus pada strategi kesantunan berbahasa berdasarkan teori Leech (2014). Analisis data mengacu pada kerangka kerja Sudaryanto, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis. Data penelitian berupa komentar tertulis warganet pada unggahan Instagram akun @pinterpolitik yang memuat isu politik dan kebijakan publik.

Data dikumpulkan melalui metode simak dengan teknik baca dan catat. Peneliti menghimpun 18 komentar yang diunggah pada periode Oktober 2025–Januari 2026. Pemilihan data dilakukan berdasarkan kriteria berikut: (1) komentar mengandung respons terhadap isu politik atau kebijakan publik, (2) komentar tidak mengandung ujaran kebencian eksplisit atau makian kasar, dan (3) komentar menunjukkan adanya strategi mitigasi atau kehati-hatian dalam penyampaian pendapat.

Tahap analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode padan pragmatik. Metode ini dipilih karena alat penentunya berada di luar bahasa, yakni konteks sosial, relasi antara penutur dan mitra tutur, serta tujuan komunikatif yang melatarbelakangi ujaran. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menafsirkan makna dan fungsi ujaran secara lebih kontekstual, terutama dalam kajian kesantunan berbahasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudaryanto (2015), metode padan pragmatik menempatkan faktor ekstralingual sebagai dasar utama dalam menentukan makna ujaran. Selain itu, metode agih diterapkan secara terbatas untuk mengidentifikasi penanda linguistik kesantunan, seperti



pilihan leksikal, bentuk mitigasi, dan struktur kalimat. Sementara itu, penafsiran makna serta fungsi ujaran tetap didasarkan pada metode padan pragmatis yang mempertimbangkan konteks sosial dan situasional.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi teori dan triangulasi sumber. Triangulasi teori dilakukan dengan mengomparasikan temuan analisis berdasarkan maksim kesantunan Leech dengan hasil-hasil penelitian pragmatik mutakhir. Adapun triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan komentar yang berasal dari akun dengan latar belakang berbeda, seperti tokoh publik, media, dan masyarakat umum, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai praktik kesantunan berbahasa di ruang digital (Creswell, 2014; Moleong, 2018).

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil klasifikasi awal, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga maksim kesantunan yang paling dominan, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim persetujuan, dan maksim pujian. Maksim lain tidak dianalisis secara mendalam karena kemunculannya relatif terbatas.

### 1. Maksim Kebijaksanaan

Maksim kebijaksanaan (*tact maxim*) dalam tindak kesantunan moderatif merujuk pada strategi berbahasa yang bertujuan meminimalkan kerugian bagi mitra tutur dan memaksimalkan manfaat bagi pihak lain dalam proses komunikasi. Dalam teori kesantunan yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech, maksim kebijaksanaan merupakan salah satu prinsip utama yang mengatur bagaimana penutur menyampaikan maksud secara hati-hati agar tidak menimbulkan ancaman terhadap muka (*face*) mitra tutur.

**Tabel 1. Dimensi Maksud Kebijaksanaan pada Kolom Komentar @pinterpolitik**

No	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Maksim
1	@jhony17_ : “ <i>Jadi pimpinan gampang tapi jadi seorang pemimpin nggak semudah omongan. Jadi jangan langsung menghakimi yang tidak-tidak</i> ” 31/10/2025	Postingan “Pramono dan Siksa Banjir Jakarta” Postingan tersebut membahas membahas penanganan banjir oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, terutama sorotan publik terhadap respons pemerintah provinsi terhadap fenomena banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta pada akhir Oktober 2025.	Penutur tidak menyalahkan pihak tertentu, tetapi mengajak melihat persoalan secara lebih luas dan proposional yang sesuai dengan tindak kesantunan masyatiyah <i>tawazun</i> yang berarti keseimbangan.	Kebijaksanaan
2	@imnugroho : “ <i>Daripada buang2 anggaran makan gaji buta ya lebih baik dibubarin wae</i> ” 28/10/2025	Postingan “Gagal Usut Whoosh Bubarkan KPK?” Postingan tersebut membahas perdebatan publik dan kritik	Mengatur cara menyampaikan kritik tetapi menunjukkan kepedulian terhadap institusi	Kebijaksanaan



		terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan ketidaktegasan atau kegagalan dalam mengusut dugaan mark-up/penyimpangan anggaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.	negara yang sesuai dengan nilai mutathanah atau kewargaan.	
3	@kopianu : <i>“menurut saya, sehina-hinanya mata pencaharian adalah memfitnah”</i> 5/1/2026	Postingan “KDM Sensi Sama Pandji?” Postingan tersebut membahas reaksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (sering disingkat <i>KDM</i> ) terhadap sindiran atau kritik yang dilontarkan oleh komika dan presenter <i>stand-up comedy</i> Pandji Pragiwaksono dalam materi acaranya yang viral.	Mengatur cara menyampaikan kritik tanpa menyerang individu tertentu yang sesuai dengan tindak kesantunan masyatiyah <i>i'tidal</i> yang berarti proposional dan adil.	Kebijaksanaan
4	@khairulihsan19 : <i>“sebaiknya riset dulu pangsa pasar dan permintaan kopi liberika itu seberapa besar??? Krna ini bukan hanya tentang tanaman yg dianggap ramah lingkungan. Akan tetapi lebih ke komoditas yg mampu memberikan dampak ekonomi yg besar meskipun dengan luasan lahan petani indonesia yang kecil2.”</i> 3/1/2026	Postingan “Move on dari Sawit ke Kopi” Postingan tersebut mengangkat diskusi tentang strategi ekonomi/pertanian Indonesia yang menyarankan transisi sebagian fokus dari industri sawit tradisional ke komoditas kopi baik sebagai respons terhadap tantangan global maupun peluang pasar baru.	Penutur tidak menyalahkan pihak tertentu, tetapi mengajak melihat persoalan secara lebih luas dan proposional yang sesuai dengan tindak kesantunan masyatiyah <i>tawazun</i> yang berarti keseimbangan.	Kebijaksanaan
5	@omnur69 : <i>“kalau menurut pendapat saya ijin dulu / ngomong dulu sama Amin Rais</i>	Postingan “The Pantheon: Soeharto – Gus Dur” Postingan tersebut membahas	Mengakui adanya perbedaan generasi dalam	Kebijaksanaan



	<p><i>dan cak nun, asal berdua itu setuju, oke, dikarenakan berdua itu yang tahu segalanya, berdua itulah kuncinya, kalau orang yang lahir pada tahun 1998 ke atas orang-orang itu tidak tahu permasalahannya.”</i> 26/10/2026</p>	<p>isu pengusulan Presiden Republik Indonesia Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai calon Pahlawan Nasional tahun 2025 serta reaksi publik terhadap gagasan tersebut.</p>	<p>memahami sejarah yang sesuai dengan nilai <i>tasamuh</i> atau tolesansi.</p>	
6	<p>@didit.tmm : “<i>Secara tidak langsung ini mematahkan argumen orang orang yang mengatakan jika sebuah lembaga dipimpin oleh tentara, pasti akan lebih cekatan, lebih tegas, dll. Harus kita sadari bersama jika kasus ini membuktikan sebaliknya, kapabilitas pemimpin sebuah lembaga tidak dilihat dari apakah dia militer atau tidak, tapi murni dari diri masing masing baik itu sipil maupun militer, stop bilang militer itu bisa lebih baik dari sipil, militer baik dalam bidangnya begitupun dengan sipil.</i>” 2/1/2026</p>	<p>postingan “Canggung Kepala BNPB Hilang Panggung?” Postingan tersebut membahas sorotan publik terhadap kinerja dan citra Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tengah krisis banjir dan longsor di beberapa provinsi Indonesia, khususnya di Sumatera dan Aceh.</p>	<p>Penutur tidak menyalahkan pihak tertentu, tetapi mengajak melihat persoalan secara lebih luas dan proposional yang sesuai dengan tindak kesantunan masyatiyah <i>tawazun</i> yang berarti keseimbangan.</p>	<p>Kebijaksanaan</p>
7	<p>@ilhamwm itu nanang : “<i>coba bikin konten juga tentang sisi tidak dimanjakannya juga dong, banyak kaya, nunggu 1 tahun dulu baru dapat cuti, jenjang karir yang apa2 harus tes lagi, anggaran yang tidak merata dll</i>”</p>	<p>Postingan “ASN Makin Dimanja?” postingan tersebut mengangkat kritik atau refleksi terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai “memanjakan” ASN serta dampaknya terhadap</p>	<p>Mengajak melihat sisi lain kebijakan ASN membuka ruang dialog, bukan vonis yang sesuai dengan nilai <i>shura</i> atau musyawarah.</p>	<p>Kebijaksanaan</p>



	2/1/2026	kinerja birokrasi dan persepsi publik.		
8	@ wafferromakelapa :” <i>Puan itu lemah, walau secara pengalaman mengurus orang ramai telah berpengalaman, tetapi lemah tidak mencerminkan soekarno. Prananda walaupun seperti introvert dan kurang kharismatik menurut orang-orang, bagi saya beliau punya prinsip dan belum punya celah politik, sehingga punya daya tawar dan sifatnya yang memilih tertutup itu membuat orang penasaran daripada yang sudah pasaran. Ini menurut keyakinan saya. Tapi lebih baik sih semua partai politik itu bubar semua 😊</i> ” 10/1/2026	Postingan “BG Bisa Tantang Puan-Panandra?” postingan tersebut menganalisis politik wacana mengenai kemungkinan persaingan tokoh politik di Indonesia, dengan sorotan pada profil, kekuatan, dan peluang masing-masing figur dalam kontestasi politik mendatang.	Mengatur cara menyampaikan kritik tokoh politik, tetapi tetap menggunakan frasa yang baik sesuai dengan nilai <i>tasamuh</i> atau toleransi.	Kebijaksanaan

Berdasarkan delapan data komentar warganet pada unggahan Instagram @pinterpolitik periode Oktober 2025–Januari 2026, terlihat adanya kecenderungan dominan penggunaan maksim kebijaksanaan (*tact maxim*) dalam merespons isu-isu politik dan kebijakan publik. Maksim kebijaksanaan menuntut penutur untuk meminimalkan kerugian bagi pihak lain dan memaksimalkan manfaat bagi mitra tutur, terutama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik (Leech, 2014). Dominasi maksim ini mengindikasikan bahwa warganet tidak semata-mata berorientasi pada ekspresi emosi atau penegasan sikap ideologis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari ujaran yang disampaikan, sejalan dengan pandangan bahwa kesantunan berbahasa berfungsi menjaga keharmonisan interaksi dan menghindari potensi konflik dalam komunikasi (Brown & Levinson, 1987). Selain itu, kecenderungan penggunaan strategi tutur yang moderatif dan tidak konfrontatif menunjukkan adanya kesadaran pragmatik dalam komunikasi digital, di mana penutur berupaya menjaga citra diri dan orang lain dalam ruang publik yang terbuka (Yule, 1996). Dalam konteks media sosial, praktik ini juga mencerminkan upaya adaptif warganet dalam menghadapi dinamika wacana politik yang sensitif, sehingga kritik dan perbedaan pandangan tetap dapat disampaikan secara argumentatif tanpa mengancam muka pihak lain (Herring, 2004).

Penelitian ini berkaitan dengan sejumlah temuan terdahulu yang membahas pola kesantunan dalam komunikasi digital. Dalam interaksi di media sosial, strategi kesantunan positif cenderung lebih dominan dibandingkan kesantunan negatif karena pengguna lebih



sering menampilkan dukungan serta apresiasi dalam komentar yang mereka tulis (Maghfiroh & Rahmiati, 2024). Di sisi lain, platform berbasis visual seperti Instagram juga memperlihatkan kecenderungan hadirnya komentar yang lebih santun dan berisi harapan positif dari para penggunanya (Sulistianah et al., 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam ruang komunikasi digital yang terbuka dan interaktif, warganet tetap mengekspresikan pandangan secara ekspresif, baik melalui sindiran halus maupun kritik secara langsung. Meskipun demikian, persoalan etika komunikasi masih menjadi tantangan yang cukup serius, terutama dalam konteks politik. Pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa—seperti maksim kebijaksanaan, kemurahan, kerendahan hati, dan kesetujuan—masih sering ditemukan dalam praktik komunikasi digital (Sibuea et al., 2025).

Pada Data (1), komentar @jhony17\_ “jadi pimpinan gampang tapi jadi seorang pemimpin nggak semudah omongan. Jadi jangan langsung menghakimi yang tidak-tidak” menunjukkan kritik yang disampaikan melalui refleksi umum tentang kepemimpinan. Penutur tidak menyebut individu secara langsung, melainkan menggunakan formulasi general sehingga kritik tidak diarahkan sebagai serangan personal. Strategi ini mencerminkan upaya meminimalkan ancaman terhadap muka (face) pihak yang dikritik, sebagaimana dijelaskan dalam teori kesantunan bahwa kritik tidak langsung merupakan bentuk mitigasi dalam interaksi sosial (Brown & Levinson, 1987). Dalam kerangka kesantunan moderatif atau kesantunan wasatiyah, pendekatan ini menunjukkan sikap tengah (*tawazun*) yang tetap menyampaikan evaluasi namun tidak menimbulkan konfrontasi terbuka (Suri & Noviyanti, 2024). Selain itu, strategi tersebut selaras dengan maksim kebijaksanaan yang menekankan pengurangan kerugian bagi mitra tutur dalam komunikasi publik (Fitriani et al, 2022).

Pada Data (3), komentar @kopianu “menurut saya, sehina-hinanya mata pencaharian adalah memfitnah” menunjukkan bentuk kritik moral yang disampaikan secara tidak langsung. Penutur tidak secara eksplisit menyebut pihak tertentu, melainkan mengemukakan prinsip etika umum tentang perilaku memfitnah. Dalam teori kesantunan, strategi ini termasuk bentuk generalisasi nilai moral yang berfungsi menghindari konflik interpersonal secara langsung (Hasibuan et al, 2020). Dalam konteks kesantunan moderatif, pendekatan ini mencerminkan sikap menengahi konflik melalui penguatan norma etika bersama, bukan melalui serangan personal (Suri & Noviyanti, 2024). Penelitian mengenai komunikasi digital juga menunjukkan bahwa penyampaian kritik melalui nilai moral universal sering digunakan untuk menjaga legitimasi dan kesantunan dalam diskursus publik (Daulay et al., 2022).

Pada Data (4), komentar @khairulihsan19 mengenai perlunya riset pangsa pasar kopi liberika menunjukkan kritik yang disampaikan melalui pendekatan analitis dan argumentatif. Penutur memberikan alasan ekonomi serta mempertimbangkan kondisi lahan petani sehingga kritik tidak hanya berupa penolakan, tetapi juga disertai pertimbangan rasional. Dalam perspektif pragmatik, penggunaan argumentasi rasional merupakan strategi kesantunan yang berfungsi mengurangi potensi konflik karena kritik disampaikan sebagai masukan konstruktif (Hidayati, 2023). Dalam kerangka kesantunan moderatif, pendekatan ini menunjukkan sikap proporsional yang menyeimbangkan antara kritik kebijakan dan pertimbangan pragmatis terhadap dampak ekonomi masyarakat (Wardani et al., 2024). Penelitian tentang wacana kebijakan di media sosial juga menunjukkan bahwa kritik berbasis argumentasi sering digunakan untuk mempertahankan kesopanan sekaligus menyampaikan evaluasi kebijakan secara rasional (Musyawir, 2024).

Pada Data (5), komentar @omnur69 yang menyarankan untuk terlebih dahulu meminta pendapat Amin Rais dan Cak Nun menunjukkan strategi kritik tidak langsung melalui rujukan kepada figur otoritatif. Penutur tidak menolak gagasan secara langsung, tetapi mengalihkan legitimasi keputusan kepada tokoh yang dianggap memiliki pengalaman sejarah. Dalam



perspektif pragmatik, strategi ini termasuk bentuk mitigasi kritik dengan menggunakan otoritas pihak ketiga sehingga tanggung jawab evaluasi tidak sepenuhnya berada pada penutur (Maulidiyah, 2022). Pendekatan tersebut mencerminkan kesantunan moderatif karena penutur berupaya menjaga keseimbangan antara kritik terhadap wacana politik dan penghormatan terhadap tokoh yang terlibat (Nugroho et al, 2022). Penelitian tentang diskursus politik digital juga menunjukkan bahwa penggunaan referensi otoritas sering menjadi strategi retorik untuk menyampaikan kritik secara lebih sopan dan legitim (Suri & Noviyanti, 2024).

Pada Data (6), komentar @didit.tmm yang membahas kepemimpinan sipil dan militer menunjukkan kritik yang disampaikan secara argumentatif dan reflektif. Penutur tidak menyerang individu tertentu, melainkan mengkritik asumsi umum bahwa militer selalu lebih unggul dalam memimpin lembaga. Dalam teori kesantunan, strategi ini termasuk bentuk kritik konseptual yang diarahkan pada gagasan, bukan pada individu, sehingga potensi ancaman terhadap muka dapat diminimalkan (cahyani, 2023). Dalam kerangka kesantunan moderatif, pendekatan ini mencerminkan sikap keseimbangan (*tawazun*) karena penutur menegaskan bahwa baik sipil maupun militer memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing (Suri & Noviyanti, 2024). Penelitian mengenai wacana publik di media sosial juga menunjukkan bahwa kritik berbasis refleksi konseptual cenderung lebih diterima dalam diskursus digital karena tidak bersifat konfrontatif (Daulay et al., 2022).

Pada Data (7), komentar @ilhamwm\_itu\_nanang yang meminta agar dibuat konten mengenai sisi lain kehidupan ASN menunjukkan bentuk kritik yang disampaikan melalui permintaan atau saran. Penutur tidak secara langsung menolak narasi bahwa ASN dimanjakan, tetapi meminta perspektif lain agar diskusi menjadi lebih seimbang. Dalam teori kesantunan, strategi permintaan atau saran sering digunakan sebagai bentuk mitigasi kritik karena memberikan ruang dialog yang lebih terbuka (Brown & Levinson, 1987). Dalam konteks kesantunan moderatif, pendekatan ini mencerminkan sikap moderasi dengan mendorong keseimbangan informasi dan menghindari generalisasi berlebihan (Leech, 2014). Penelitian mengenai komunikasi digital juga menunjukkan bahwa strategi meminta klarifikasi atau perspektif tambahan sering digunakan untuk menjaga kesantunan dalam perdebatan daring (Wardani et al., 2024).

Pada Data (8), komentar @wafferromakelapa yang menilai figur politik tertentu menunjukkan kritik yang disampaikan melalui opini personal dengan penanda subjektivitas seperti “menurut orang-orang” dan “bagi saya”. Penanda linguistik tersebut berfungsi sebagai mitigasi agar kritik tidak dianggap sebagai klaim objektif yang menyerang pihak tertentu. Dalam perspektif pragmatik, penggunaan penanda subjektivitas merupakan strategi kesantunan yang mengurangi kekuatan ilokusi kritik (Leech, 2014). Dalam kerangka kesantunan moderatif, strategi ini menunjukkan sikap tengah dengan mengakui bahwa penilaian yang disampaikan merupakan pandangan pribadi, bukan kebenaran mutlak (Suri & Noviyanti, 2024). Penelitian tentang wacana politik di media sosial juga menunjukkan bahwa penggunaan ekspresi subjektif sering digunakan untuk menjaga etika komunikasi sekaligus mempertahankan kebebasan berpendapat dalam diskursus publik digital (Musyawir, 2024).

Penggunaan strategi bahasa yang menghindari penyebutan tokoh secara eksplisit menunjukkan adanya kecenderungan warganet untuk menjaga sensitivitas dalam komunikasi publik. Dengan memilih formulasi berupa generalisasi, penutur secara pragmatis berupaya meminimalkan potensi ancaman terhadap muka (*face-threatening acts*) pihak yang menjadi sasaran kritik, sebagaimana dijelaskan dalam teori kesantunan bahwa strategi tidak langsung dapat mengurangi risiko konflik interpersonal (Brown & Levinson, 1987). Ujaran reflektif semacam ini berfungsi sebagai evaluasi normatif yang disampaikan secara tidak langsung, sehingga kritik dipersepsikan sebagai pengingat moral yang bersifat universal, bukan sebagai



serangan personal. Strategi tersebut juga mencerminkan kesadaran penutur terhadap sensitivitas isu politik serta konsekuensi sosial dari ujaran yang dihasilkan, terutama dalam ruang digital yang terbuka dan berpotensi memperluas dampak komunikasi. Dalam konteks ini, penggunaan generalisasi dan bentuk mitigasi menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara penyampaian kritik dan pemeliharaan hubungan sosial (Yule, 1996). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa maksim kebijaksanaan mendorong penutur untuk mengurangi kerugian psikologis mitra tutur, khususnya dalam situasi komunikasi yang mengandung potensi konflik dan ketegangan interpersonal (Leech, 2014).

## 2. Maksim Persetujuan

Maksim persetujuan (*agreement maxim*) adalah salah satu prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech, yang bertujuan meminimalkan ketidaksepakatan dan memaksimalkan kesepakatan antara penutur dan mitra tutur dalam interaksi. Prinsip ini menekankan bahwa penutur sebaiknya menyatakan dukungan, kesepakatan, atau penghargaan terhadap pandangan, sikap, atau tindakan pihak lain, sehingga hubungan sosial tetap harmonis dan risiko konflik diminimalkan.

**Tabel 2. Dimensi Maksud Persetujuan pada Kolom Komentar @pinterpolitik**

No	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Maksim
9	@faridahnp : “Yhaaa kalo uang tunainya aja sebanyak itu biasanya lainnya juga banyak termasuk akal nya 😊 Tapi oke nih Pak Pur” 10/10/2025	Postingan “Redenominasi Purbaya: Was-was Penimbun Uang.”	Menyatakan setuju dengan kehati-hatian, ada keseimbangan antara kritik implisit dan apresiasi yang sesuai dengan nilai <i>tawazun</i> atau keseimbangan.	Persetujuan
10	@novikusuma42o : “Setuju Bapak Soeharto dan Gusdur jadi pahlawan nasional” 26/10/2025	Postingan “The Pantheon: Soeharto – Gus Dur”	Mendukung usulan tokoh menjadi pahlawan nasional yang sesuai dengan nilai <i>tasamuh</i> atau toleransi	Persetujuan
11	@ridhooscf : “asli ini hebat banget” 3/1/2026	postingan “Diaspora: The Invisible Heroes” ostingan ini menyoroti bagaimana diaspora Indonesia — yaitu warga keturunan atau WNI yang tinggal di luar negeri — berperan penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi,	Menghindari penolakan frontal, tidak menyerang pihak lain yang sesuai dengan nilai <i>i'tidal</i> atau proposional dan adil.	Persetujuan



		dan diplomasi, serta bagaimana mereka dapat menjadi jembatan strategis antara Indonesia dan dunia luas.		
12	@dwiarya0905 : “Mantap, naikkan tukin kejaksanaan RI” 2/1/2026	postingan “Rp585 T! Kejagung Pecah Rekor?” Postingan tersebut membahas capaian besar Kejaksaan Agung dalam konteks penegakan hukum, khususnya perkara korupsi dan pengembalian uang negara.	Menyatakan kesepakatan aspirasi bukan tekanan agresif yang sesuai dengan nilai <i>i'tidal</i> atau proposional dan adil.	Persetujuan
13	@verial2907 : “IKN dirancang sbg ibu kota politik, jd perpindahan akan bertahap, bukan instan. Keramaian dan aktivitas akan tumbuh seiring fungsi pemerintahan berjalan dan infrastruktur makin lengkap.” 15/1/2026	Postingan “Makin Syahdu SimCity IKN” postingan tersebut membahas untuk pertama kalinya Prabowo mengunjungi IKN setelah menjadi Presiden RI dan serba-serbi IKN.	Memberikan pemahaman tanpa menyalahkan pihak yang berbeda pandangan sesuai dengan nilai <i>tasamuh</i> atau toleransi.	Persetujuan
14	@jiwasmansaku : “Mantap pertanda ngopi bareng IKN infrastruktur kemajuan pembangunan berbangsa dan bernegara indonesia khususnya untuk kepentingan kehidupan gen Z indonesia” 15/1/2026	Postingan “Makin Syahdu SimCity IKN” postingan tersebut membahas untuk pertama kalinya Prabowo mengunjungi IKN setelah menjadi Presiden RI dan serba-serbi IKN.	Mengaitkan pembangunan IKN dengan masa depan generasi muda yang sesuai dengan nilai <i>islah</i> atau perbaikan.	Persetujuan

Data (9)–(14) menunjukkan adanya kecenderungan kuat penggunaan maksim persetujuan (*agreement maxim*) dalam respons warganet terhadap berbagai unggahan politik di akun Instagram @pinterpolitik. Maksim ini menekankan upaya penutur untuk memaksimalkan



kesepakatan dan meminimalkan ketidaksepakatan dengan mitra tutur, sehingga interaksi tetap berlangsung secara harmonis meskipun berada dalam konteks yang berpotensi memunculkan perbedaan pandangan (Leech, 2014). Strategi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pragmatik untuk meredakan konflik dan menjaga stabilitas hubungan sosial dalam komunikasi publik. Dalam praktiknya, kecenderungan menyatakan persetujuan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga muka (*face*) mitra tutur, di mana penutur berusaha menghindari konfrontasi langsung yang dapat memicu ketegangan interpersonal (Brown & Levinson, 1987). Selain itu, preferensi terhadap kesepakatan dalam wacana digital menunjukkan bahwa warganet tidak hanya berorientasi pada penyampaian opini, tetapi juga mempertimbangkan penerimaan sosial terhadap ujaran yang disampaikan (Yule, 1996).

Dengan demikian, dominasi maksim persetujuan mencerminkan adanya kesadaran pragmatik untuk menjaga keharmonisan interaksi di tengah dinamika diskursus politik yang kompleks dan sering kali polarisatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, Siti Robiatun et., al 2025) menunjukkan bahwa maksim persetujuan (*agreement maxim*) berperan dalam menciptakan interaksi harmonis dalam wacana digital akademik, menggunakan kerangka sosiopragmatik dan prinsip kesantunan Leech. Hasilnya menunjukkan bahwa maksim persetujuan penting untuk membangun rasa kesamaan pandang dan memperkuat citra komunikasi yang etis dalam konteks pembicaraan digital. Temuan ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sueb, Sueb & Arin Fitriani 2025) yang menunjukkan bahwa salah satu bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa dalam komentar netizen mencakup penggunaan *agreement maxim*, yang menunjukkan upaya netizen untuk menyatakan persetujuan atau kesamaan pandangan secara santun terhadap konten yang ditampilkan. Temuan yang ditemukan lagi yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Atuzzahro, Avida Alvi et., al 2025) studi yang mengeksplorasi realisasi prinsip-prinsip kesantunan (termasuk *agreement maxim*) dalam komentar netizen di media sosial seperti Instagram. Meskipun fokus utamanya adalah kesantunan secara umum, penulis menyebutkan *agreement maxim* sehubungan dengan bagaimana netizen memaksimalkan konsistensi dan kesepakatan dalam tuturan mereka di ranah digital.

Pada Data (9), komentar @faridahnp “Yhaaa kalo uang tunainya aja sebanyak itu biasanya lainnya juga banyak termasuk akalnya 😊 Tapi oke nih Pak Pur” menunjukkan bentuk persetujuan yang disampaikan melalui humor dan implikatur positif. Penutur menyiratkan dukungan terhadap sikap kehati-hatian dalam kebijakan redenominasi dengan menggunakan ekspresi santai yang tidak konfrontatif. Dalam perspektif pragmatik, penggunaan humor dan implikatur positif merupakan strategi kesantunan yang dapat memperkuat solidaritas sosial serta mengurangi potensi ketegangan dalam diskursus publik (Leech, 2014). Pendekatan ini juga mencerminkan kesantunan moderatif karena penutur mengekspresikan persetujuan secara ringan dan tidak berlebihan, sehingga tetap menjaga keseimbangan dalam interaksi komunikasi digital (Brown & Levinson, 1987). Penelitian mengenai komunikasi politik di media sosial menunjukkan bahwa ekspresi dukungan yang dibungkus dengan humor sering digunakan untuk memperkuat penerimaan pesan tanpa memicu konflik (Suri & Noviyanti, 2024).

Pada Data (10), komentar @novikusuma42o “Setuju Bapak Soeharto dan Gusdur jadi pahlawan nasional” menunjukkan bentuk persetujuan langsung terhadap wacana pengusulan tokoh nasional sebagai pahlawan. Ujaran ini mencerminkan maksim persetujuan karena penutur secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap gagasan yang sedang didiskusikan dalam ruang publik. Dalam teori kesantunan, maksim persetujuan berfungsi memaksimalkan kesepakatan dan meminimalkan potensi pertentangan antara penutur dan mitra tutur (Leech, 2014). Dalam kerangka kesantunan moderatif, dukungan tersebut juga menunjukkan sikap tengah dengan menerima gagasan tanpa menimbulkan polemik tambahan dalam diskursus



politik yang sensitif (Brown & Levinson, 1987). Penelitian tentang wacana politik digital menunjukkan bahwa ekspresi persetujuan sederhana sering berfungsi sebagai mekanisme menjaga harmoni dalam percakapan daring (Wardani et al., 2024).

Pada Data (11), komentar @ridhooscf “asli ini hebat banget” merupakan bentuk apresiasi singkat terhadap peran diaspora Indonesia yang dibahas dalam unggahan. Ujaran ini menunjukkan dukungan melalui ekspresi pujian yang memperkuat citra positif terhadap subjek yang dibicarakan. Dalam teori kesantunan, pujian merupakan strategi yang memperkuat solidaritas sosial dan memperbesar tingkat kesepakatan dalam interaksi komunikasi (Leech, 2014). Dalam konteks kesantunan moderatif, ekspresi apresiatif seperti ini berfungsi menjaga suasana diskursus tetap positif tanpa memicu perdebatan yang tidak perlu (Brown & Levinson, 1987). Penelitian mengenai komunikasi digital juga menunjukkan bahwa bentuk dukungan singkat seperti pujian atau afirmasi sering digunakan untuk memperkuat konsensus dalam ruang diskusi daring (Musyawir, 2024).

Pada Data (12), komentar @dwiarya0905 “Mantap, naikkan tukin kejaksaaan RI” menunjukkan bentuk persetujuan terhadap capaian Kejaksaan Agung dalam pengembalian kerugian negara. Penutur mengekspresikan dukungan terhadap penghargaan institusional berupa peningkatan tunjangan kinerja sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja lembaga. Dalam perspektif pragmatik, dukungan terhadap kebijakan atau institusi melalui ekspresi afirmatif merupakan bentuk implementasi maksim persetujuan yang memperkuat solidaritas sosial dalam diskursus publik (Leech, 2014). Dalam kerangka kesantunan moderatif, strategi ini menunjukkan sikap proporsional dengan mengekspresikan dukungan tanpa memunculkan retorika yang berlebihan atau menyerang pihak lain (Brown & Levinson, 1987). Penelitian mengenai wacana politik di media sosial juga menunjukkan bahwa afirmasi terhadap institusi sering berfungsi sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah (Daulay et al., 2022).

Pada Data (13), komentar @verial2907 yang menjelaskan bahwa perpindahan ibu kota bersifat bertahap menunjukkan bentuk persetujuan yang disampaikan melalui argumentasi rasional. Penutur tidak hanya menyatakan dukungan terhadap pembangunan IKN, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai logika kebijakan tersebut. Dalam teori kesantunan, penyampaian persetujuan melalui argumentasi rasional dapat memperkuat legitimasi pendapat sekaligus menjaga kualitas diskursus publik (Leech, 2014). Dalam konteks kesantunan moderatif, pendekatan ini mencerminkan sikap keseimbangan dengan memberikan dukungan yang disertai penjelasan objektif sehingga percakapan tetap konstruktif (Suri & Noviyanti, 2024). Penelitian tentang komunikasi kebijakan di media sosial menunjukkan bahwa argumen rasional sering digunakan untuk memperkuat dukungan terhadap kebijakan publik secara santun (Wardani et al., 2024).

Pada Data (14), komentar @jiwasmansaku yang menyatakan “Mantap pertanda ngopi bareng IKN infrastruktur kemajuan pembangunan berbangsa dan bernegara” menunjukkan bentuk persetujuan yang disampaikan melalui optimisme terhadap pembangunan nasional. Penutur mengaitkan aktivitas simbolik dengan harapan terhadap kemajuan pembangunan negara, sehingga dukungan disampaikan dalam bentuk narasi positif. Dalam perspektif pragmatik, ekspresi optimisme kolektif merupakan strategi kesantunan yang memperkuat solidaritas dan identitas sosial dalam komunikasi publik (Leech, 2014). Dalam kerangka kesantunan moderatif, pendekatan ini mencerminkan upaya membangun narasi dukungan yang tidak provokatif serta tetap menjaga keharmonisan diskursus politik digital (Brown & Levinson, 1987). Penelitian mengenai komunikasi publik di media sosial juga menunjukkan bahwa ekspresi dukungan berbasis optimisme sering digunakan untuk membangun konsensus dalam isu pembangunan nasional (Musyawir, 2024).



### 3. Maksim Pujian

Maksim pujian (approbation maxim) adalah salah satu prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech, yang bertujuan memaksimalkan penghargaan dan apresiasi terhadap pihak lain sambil meminimalkan ekspresi negatif atau merendahkan. Prinsip ini menekankan bahwa penutur sebaiknya menyoroti sisi positif, prestasi, atau kualitas baik mitra tutur untuk memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan rasa saling menghargai.

**Tabel 3. Dimensi Maksud Pujian pada Kolom Komentar @pinterpolitik**

No	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Maksim
15	@zulkarnainhalid : “Bangga utk adik2 kami” 5/1/2026	postingan “Tito & Praja State Reserve”	Memberi apresiasi sederhana, tidak hiperbolik yang sesuai dengan nilai <i>i'tidal</i> atau proporsional dan adil.	Pujian
16	@yhosputra07 : “Bangga kepada asn kemendagri dan praja IPDN yang melakukan aksi nyata berdampak langsung kepada rakyat” 5/1/2026	Postingan “Tito & Praja State Reserve”	Kebanggaan tidak sekadar emosional, tetapi didasarkan pada aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat yang sesuai dengan nilai <i>tawazun</i> atau keseimbangan.	Pujian
17	@ichalkate : “masyaallah gubernurku tuh” 1/1/2026	Postingan “Gubernur Main Character Energy 2025”	Mengapresiasi langkah positif sesuai dengan nilai <i>i'tidal</i> atau proposional dan adil.	Pujian
18	@firarembulan : “Bu puan kinerjanya ga main main, yang lain masih main main 🤔🤔” 10/1/2026	Postingan “BG Bisa Tantang Puan-Prananda”	Mengapresiasi dengan cara membandingkan kinerja aktor lain, namun masih dalam bentuk ringan yang sesuai dengan nilai <i>tawazun</i> atau keseimbangan.	Pujian

Berdasarkan Data (15)–(18), tampak adanya kecenderungan dominan penggunaan maksim pujian (approbation maxim) dalam kolom komentar Instagram sebagai bagian dari strategi kesantunan berbahasa. Maksim ini menekankan upaya penutur untuk memaksimalkan ekspresi pujian serta meminimalkan bentuk celaan terhadap pihak lain, sehingga interaksi yang terbangun cenderung harmonis dan berkontribusi pada pembentukan citra positif mitra tutur (Leech, 2014). Dalam konteks komunikasi digital yang terbuka, praktik ini juga berfungsi sebagai upaya menjaga hubungan sosial dan menghindari potensi konflik yang dapat muncul akibat ujaran yang bersifat negatif. Selain itu, kecenderungan memberikan pujian dapat dipahami sebagai strategi untuk memperkuat solidaritas dan kedekatan sosial antara penutur dan mitra tutur, terutama dalam ruang publik yang memungkinkan keterlibatan banyak pihak (Brown & Levinson, 1987). Pujian juga berperan sebagai bentuk evaluasi positif yang dapat



meningkatkan penerimaan sosial terhadap figur atau gagasan yang dibicarakan (Yule, 1996). Oleh karena itu, dalam ruang digital yang sarat potensi konflik, penggunaan maksim pujian tidak hanya berfungsi sebagai peredam ketegangan, tetapi juga sebagai sarana legitimasi sosial terhadap figur publik serta penguatan citra yang ingin dibangun di hadapan khalayak.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai studi terdahulu yang mengkaji fungsi pujian dan persetujuan dalam komunikasi digital. Pujian terhadap figur publik dalam kolom komentar media sosial diketahui tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi apresiasi, tetapi juga sebagai strategi afiliasi sosial untuk membangun kedekatan simbolik antara warganet dan tokoh yang dipuji (Sari & Pranowo, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pujian berperan dalam memperkuat legitimasi sosial dalam ruang diskursus publik, terutama ketika disampaikan secara terbuka di platform digital. Selain itu, kecenderungan penggunaan maksim persetujuan dalam komentar politik juga menunjukkan fungsi strategis dalam meredam konflik dan menjaga keharmonisan interaksi. Persetujuan kerap diwujudkan melalui evaluasi positif, dukungan implisit, maupun afirmasi emosional yang secara pragmatis membantu penutur menghindari posisi konfrontatif (Wulandari & Rahardi, 2020). Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa kesantunan berbahasa merupakan strategi adaptif dalam ruang digital yang terbuka dan rentan terhadap perbedaan pandangan. Di sisi lain, pujian dalam wacana politik daring juga dapat berfungsi sebagai alat *framing* positif terhadap kebijakan atau kinerja aktor politik, terutama ketika disertai dengan justifikasi rasional yang memperkuat daya persuasinya (Kurniawan & Yuliani, 2021). Dengan demikian, pujian tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga argumentatif karena mengandung pertimbangan nilai dan manfaat sosial. Hal ini sejalan dengan konsep maksim pujian yang menekankan peninggian citra mitra tutur sebagai bentuk kesantunan dalam berbahasa (Leech, 2014).

Pada Data (15), komentar @zulkarnainhalid “Bangga utk adik-adik kami” menunjukkan bentuk pujian yang disampaikan secara singkat namun bermakna apresiatif terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam perspektif pragmatik, ekspresi pujian berfungsi untuk memaksimalkan penghargaan terhadap pihak lain serta meminimalkan sikap merendahkan dalam interaksi sosial (Leech, 2014). Bentuk pujian sederhana seperti ini juga memperkuat solidaritas sosial antara penutur dan pihak yang dipuji karena menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi mereka (Brown & Levinson, 1987). Dalam kerangka kesantunan moderatif, ekspresi apresiasi yang singkat dan tidak berlebihan mencerminkan sikap proporsional yang menjaga keseimbangan antara penghargaan dan kesantunan dalam komunikasi publik digital (Suri & Noviyanti, 2024).

Pada Data (16), komentar @yhosputra07 “Bangga kepada ASN Kemendagri dan Praja IPDN yang melakukan aksi nyata berdampak langsung kepada rakyat” menunjukkan bentuk pujian yang lebih eksplisit karena menyoroti dampak konkret dari tindakan yang dilakukan. Dalam teori kesantunan, memuji kontribusi pihak lain merupakan strategi yang memperkuat hubungan sosial serta membangun citra positif terhadap individu atau institusi yang dipuji (Leech, 2014). Penutur tidak hanya mengekspresikan kebanggaan, tetapi juga menegaskan nilai sosial dari tindakan tersebut sehingga pujian memiliki dimensi legitimasi sosial (Brown & Levinson, 1987). Dalam konteks kesantunan moderatif, pujian yang disertai alasan rasional seperti ini menunjukkan penghargaan yang proporsional dan konstruktif terhadap tindakan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat (Daulay et al., 2022).

Pada Data (17), komentar @ichalkate “masyaallah gubernurkuh tuhh” merupakan bentuk pujian yang disampaikan melalui ekspresi emosional dan religius. Dalam komunikasi digital, penggunaan ungkapan religius seperti “masyaallah” sering berfungsi sebagai penanda kekaguman sekaligus bentuk legitimasi moral terhadap tindakan yang dipuji (Leech, 2014). Strategi ini juga memperlihatkan bagaimana emosi positif digunakan untuk memperkuat



solidaritas sosial antara penutur dan tokoh yang dipuji (Brown & Levinson, 1987). Dalam kerangka kesantunan moderatif, ekspresi apresiasi yang bernuansa emosional tetap berada dalam batas kesopanan karena tidak mengandung unsur provokasi atau serangan terhadap pihak lain (Suri & Noviyanti, 2024).

Pada Data (18), komentar @firarembulan “Bu Puan kinerjanya ga main-main, yang lain masih main-main” menunjukkan bentuk pujian yang disampaikan melalui strategi perbandingan. Dalam teori kesantunan, pujian yang disertai perbandingan dapat memperkuat citra positif pihak yang dipuji, meskipun berpotensi menimbulkan implikasi negatif terhadap pihak lain (Leech, 2014). Namun, penggunaan gaya humor dan hiperbola dalam komentar tersebut berfungsi sebagai strategi mitigasi sehingga kritik terhadap pihak lain tidak disampaikan secara langsung atau agresif (Brown & Levinson, 1987). Dalam konteks kesantunan moderatif, strategi ini menunjukkan bagaimana pujian dapat digunakan untuk mengekspresikan dukungan politik secara moderat dengan tetap menjaga batas kesantunan dalam diskursus politik digital (Wardani et al., 2024).

Bagian ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel hasil penelitian. Pada bagian ini ada empat hal yang dapat dilakukan, yaitu (1) menjawab masalah penelitian, atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, (2) menafsirkan temuan-temuan, (3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, dan (4) menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada.

#### **IV. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap komentar warganet pada unggahan akun Instagram pinterpolitik, dapat disimpulkan bahwa tindak kesantunan moderatif merupakan strategi pragmatik yang dominan digunakan dalam merespons isu-isu politik di ruang digital. Kesantunan moderatif memungkinkan warganet menyampaikan kritik, persetujuan, maupun apresiasi secara adaptif dengan mempertimbangkan sensitivitas isu politik serta relasi sosial yang terbangun dalam interaksi daring.

Di sisi lain, maksim persetujuan terealisasi dalam berbagai bentuk, mulai dari persetujuan langsung, evaluatif, afektif, hingga yang disertai argumentasi. Ekspresi persetujuan tersebut berfungsi menegaskan kesamaan sikap, membangun solidaritas simbolik, serta menempatkan penutur pada posisi yang tidak konfrontatif di ruang publik digital. Sementara itu, maksim pujian dimanfaatkan sebagai sarana legitimasi sosial melalui ungkapan apresiatif, baik yang sederhana, berbasis penilaian terhadap kinerja, bernuansa emosional-religius, maupun dikemas secara humoris.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kesantunan moderatif mencerminkan kesadaran pragmatik warganet dalam mengelola ujaran politik secara etis dan kontekstual. Kesantunan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap norma berbahasa, tetapi juga sebagai strategi komunikasi yang memungkinkan kritik dan dukungan disampaikan secara aman, dialogis, dan konstruktif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian pragmatik wacana politik digital sekaligus memberikan implikasi praktis bagi penguatan literasi digital yang berorientasi pada etika komunikasi di media sosial.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Amelia, D., & Anwar, K. (2021). Language Politeness in Digital Communication: A Pragmatic Analysis. *Journal of Language and Literature Studies*, 12(2), 144–153.



- Amalia, F. (2021). Kesantunan dalam Komentar Netizen: Analisis Pragmatik. *Jurnal Bahasa dan Komunikasi*, 7(1), 101–112.
- Alfitri, & Rahmawati, D. (2021). Strategi Wacana Politik Netizen di Media Sosial. *Jurnal Linguistik Digital*, 6(2), 55–69.
- Arifin, Z., & Rahmawati, D. (2021). Hate Speech in Social Media: A Sociopragmatic Study. *Linguistics and Communication Journal*, 8(1), 33–47.
- Brown, P., & Levinson, S. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cahyani, N. A. (2023). Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi Digital: Kajian Pragmatik. *Jurnal Linguistik Nusantara*, 5(1), 89–100.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Daulay, H., Siregar, M., & Harahap, R. (2022). Kesantunan berbahasa dalam wacana politik di media sosial. *Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 17(2), 145–156.
- Farahdiba, I. (2021). Strategi Kesantunan Moderatif dalam Wacana Kritik Sosial di Media Sosial. *Bahasa dan Seni*, 49(1), 54–66.
- Fitriani, D., & Hartono, R. (2022). Pragmatik Kesantunan dalam Debat Politik Online. *Jurnal Bahasa dan Politik*, 10(2), 134–148.
- Hasibuan, R., & Wahyuni, S. (2020). Pola Komunikasi Politik Warganet di Instagram. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 181–192.
- Herring, S. C. (2007). A Faceted Classification Scheme for Computer-Mediated Discourse. *Language@Internet*, 4(1).
- Hidayati, R. (2023). Wacana Politik Digital dan Literasi Media. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 8(1), 77–89.
- Ilhami, F., & Siregar, R. (2021). Pragmatik Digital dan Pola Kesantunan Netizen Indonesia. *Jurnal Ilmu Bahasa*, 6(2), 44–58.
- Kartikasari, M., & Santoso, B. (2021). Strategi Kesantunan Netizen dalam Komentar Sosial Politik. *Jurnal Wacana Online*, 9(1), 22–34.
- Leech, G. (2014). *The Pragmatics of Politeness*. Oxford University Press.
- Lestari, R., & Diani, A. (2023). Ujaran Kebencian dan Ketimpangan Gender dalam Media Sosial. *Jurnal Gender dan Wacana*, 7(2), 118–132.
- Maulidiyah, S. (2022). Pragmatik Digital dan Perilaku Verbal Netizen: Studi Kasus Instagram. *Jurnal Pragmatik Indonesia*, 3(2), 77–90.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (ed. revisi). Remaja Rosdakarya.
- Musyawir. (2024). Strategi kesantunan berbahasa netizen dalam diskursus politik di media sosial. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 42(1), 55–68.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nugroho, A., & Santoso, A. (2022). Partisipasi Politik Digital di Era Post-Truth. *Jurnal Sosial dan Politik*, 14(1), 66–79.
- Nurhayati, E., & Yusuf, A. (2023). Diskursus Kesantunan dalam Media Sosial Politik. *Jurnal Bahasa dan Budaya*, 11(1), 22–37.
- Oktaviani, D., & Hermagustiana, I. (2022). Strategi Bahasa Netizen dalam Kolom Komentar Tokoh Politik. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 16(1), 45–59.
- Pratama, R. D., & Fauzia, S. (2020). Agresi Verbal dalam Komentar Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Digital*, 9(2), 202–215.
- Purwanto, A., & Ariyani, F. (2020). Netizen dan Strategi Wacana Moderatif dalam Komentar Instagram. *Jurnal Semiotic*, 14(2), 91–105.



- Putri, A. S., & Santosa, R. (2021). Analisis Pragmatik Kesantunan dalam Forum Komentar Politik. *Jurnal Bahasa dan Politik*, 2(2), 60–72.
- Rahayu, N., & Pranata, A. (2023). Tindak Tutur dan Kesantunan dalam Komentar Instagram Politik. *Jurnal Pragmatik Sosial*, 7(1), 50–65.
- Rizky, A. & Rohmah, M. (2022). Kesantunan Digital dan Literasi Politik Masyarakat Muda. *Jurnal Literasi Digital*, 4(1), 77–89.
- Rukmini, D., & Suganda, R. (2019). Kesantunan dalam Wacana Kritik Daring. *Jurnal Bahasa dan Budaya Digital*, 3(2), 109–124.
- Saputra, H., & Zulfa, F. (2020). Praktik Diskursif di Media Sosial Politik. *Jurnal Analisis Wacana*, 5(1), 35–49.
- Sari, M., & Hapsari, R. (2023). Pragmatik dan Kesantunan dalam Wacana Twitter Politik Indonesia. *Jurnal Komunikasi Digital*, 10(1), 13–27.
- Setiawan, H., & Indriani, S. (2022). Citra Diri dan Kesantunan dalam Komentar Politik di Instagram. *Jurnal Wacana Politik Digital*, 5(1), 33–49.
- Suri, A., & Noviyanti, E. (2024). Kesantunan berbahasa dalam komunikasi digital: Analisis pragmatik pada komentar media sosial. *Jurnal Bahasa dan Komunikasi*, 9(1), 1–12.
- Tsur, O., & Rappoport, A. (2012). What's in a Hashtag? Content-based Prediction of the Spread of Ideas in Microblogging Communities. *WSDM*.
- Utami, R. S. (2020). Tindak Tutur Kesantunan dalam Interaksi Mahasiswa di Media Sosial. *Jurnal Linguistik dan Pendidikan Bahasa*, 4(2), 55–70.
- Wahyuni, S., & Nurlaili, N. (2023). Kekasaran Verbal dalam Komentar Politik di Media Sosial. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Teknologi*, 8(2), 55–70.
- Wardani, D. P., Nugroho, A., & Rahmawati, L. (2024). Pola interaksi dan kesantunan dalam komentar politik di media sosial. *Jurnal Pragmatik Indonesia*, 6(2), 101–115.
- Watts, R. J. (2003). *Politeness*. Cambridge University Press.
- Wijayanti, S., & Anggraini, F. (2020). Wacana Politik dan Strategi Kesantunan dalam Komentar Publik. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(1), 44–59.
- Wulandari, F., Nugroho, D., & Mahendra, B. (2023). Strategi Mitigasi dalam Wacana Kritik Netizen. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Media*, 6(2), 89–101.
- Yuliana, R., Handayani, A., & Zainuddin, M. (2022). Analisis Linguistik terhadap Ujaran Kebencian Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(3), 213–229.
- Yule, G. (2014). *The Study of Language* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Zappavigna, M. (2015). Searchable Talk: The Linguistic Functions of Hashtags. *Social Semiotics*, 25(3), 274–291.
- Zhao, W. X., Jiang, J., Weng, J., He, J., Lim, E. P., Yan, H., & Li, X. (2018). Comparing Twitter and Traditional Media Using Topic Models. *Advances in Information Retrieval*, 338–349.
- Tannen, D. (2005). *Conversational Style: Analyzing Talk Among Friends*. Oxford University Press.